BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
MONITOR BERITA

Hal :

O BISNIS INDONESIA	O SUARA PEMBARUAN O KORAN KONTAN
O INVESTOR DAILY	O SINAR HARAPAN
O KOMPAS	O TABLOID KONTAN
O KORAN TEMPO	O THE JAKARTA POST
O MEDIA INDONESIA	O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT	O MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA	O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA	O NERACA
O SUARA KARYA	O SEPUTAR INDONESIA

KODE : O GAS O BBM O UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											

HALAMAN :

Menyoroti Strategi Energy Mix Pemerintah

Ibrahim Hasyim,
Anggota Komite BPH Migas

Target bauran energi nasional (*energy mix*) tampaknya akan berubah lagi. Ini pertanda ada rasa optimisme dan pesimisme untuk mencapainya. Pada tahun 2005, minyak bumi masih memegang porsi terbesar yaitu 51,66%. Selanjutnya, gas bumi 28,57%, batubara 15,34% dan energi lain 4,43%.

Tapi melalui Keppres No. 5/2006, pemerintah bertekad mengoptimalkan pengembangan sumber energi. Targetnya, komposisi bauran energi pada 2025 berubah: batubara 33%, gas bumi 30%, minyak 20% dan energi terbaru 17%.

Bagi produsen dan masyarakat, perubahan itu menyimpan pertanyaan besar: apa strategi pemerintah untuk mencapainya? Sebab, pemerintah membutuhkan peran industri dalam pengembangan produksi dan berharap perubahan pola konsumsi oleh masyarakat.

Pada 2006, World Energy Council, lembaga yang mempelajari energi jangka panjang dunia, pernah menyatakan, perbedaan jumlah dan pola konsumsi energi antarnegara karena perbedaan kekuatan kebijakan pemerintah, intensitas peran industri dan partisipasi masyarakat. Kebijakan mengganti bahan bakar di sektor transportasi baru akan dimulai awal 2012. Pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan gas bumi (BBG) dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang adalah *biofuel* sebagai alternatif bahan bakar kendaraan bermotor. Apakah kebijakan ini berhasil?

Jika mencontoh negara lain, kunci keberhasilan terletak pada pilihan strategi dasar yang akan diterapkan Pemerintah. Argentina dan Brazil termasuk negara-negara yang berhasil mengembangkan penggunaan bahan bakar gas dan *biofuel*.

Menurut Secretaria De Energia Argentina, *energy mix* Argentina pada 2010 terdiri dari gas bumi sebagai sumber energi utama dengan porsi 50%. Sedangkan minyak termasuk *biofuel* 39%, tenaga *hydro* 8%, tenaga nuklir 3%.

Argentina mengembangkan pemakaian BBG sejak 1985. Saat ini sudah ada 2.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Ribuan SPBG ini melayani 1,8 juta unit mobil. Alhasil, industri kompresor untuk SPBG dan konverter untuk mobil dan sepeda motor berkembang biak, bahkan diekspor.

Keberhasilan Argentina terletak pada pilihan strategi dasarnya yaitu menetapkan harga BBG yang menarik bagi investor dan menguntungkan masyarakat. Harga BBG hanya setengah harga BBM.

Perbedaan harga terus dijaga dan dikendalikan dari waktu ke waktu sesuai fluktuasi harga minyak dunia. Argentina tidak membutuhkan program sosialisasi berkepanjangan. Pembangunan infrastruktur SPBG berjalan sendiri tanpa bantuan pemerintah.

Brazil juga menggunakan pilihan strategi harga ketika mengembangkan pemakaian *biofuel* untuk bahan bakar. Memang ada beberapa perbedaan, tapi prinsip dasarnya sama. Pemerintah tidak membahas perbandingan biaya produksi *biofuel* dengan harga jual BBM dan jumlah subsidi negara. Mereka melihatnya pada seberapa besar lahan kosong yang bisa dimanfaatkan dan petani yang bisa bekerja. Jadi yang dihitung adalah manfaat pengembangan *biofuel* itu.

Argentina berhasil mengembangkan pemakaian bahan bakar gas.

Produsen energi juga dijamin pengembalian investasinya dengan status perkebunan bahan baku didedikasikan hanya untuk produksi *biofuel*. Jadi, sejak awal sudah jelas kalkulasi finansial untung-ruginya. Tidak ada godaan untuk ekspor misalnya, hanya ka rena harga *ethanol* di pasar duni sedang menaik. Pengembanga *biofuel* di Brazil bisa maju seper sekarang bukanlah pekerjaan se bentar. Mereka konsisten me manfaatkan setiap momentun seperti kenaikan harga minyak.

Mengacu pada pengalaman A gentina dan Brazil, pemilihan stra tegi dasar harga yang digunaka untuk mendukung kebijakan d versifikasi terbukti berhasil. Stra tegi harga diterapkan untuk p ngembangan energi, bukan bua menopang kebijakan fiskal yan bersifat tahunan, seperti meneka subsidi.

Bagi Indonesia, pilihan strate dan momentum yang tepat adala keharusan untuk mencapai targ *energy mix*. Pilihan strategi harg telah diambil pada awal 2012 d ngan menetapkan harga BB sebesar Rp 4.100 per liter atau s tara Premium. Tapi, harga i sama dengan tingkat harga yar diminta investor untuk penger bangan SPBG.

Apakah harga ini menarik ba konsumen? Maklum, disparit harga BBG dengan Premium m sih kecil. Untuk menarik kons men pengguna BBG secara mass dan berkelanjutan, jalannya ad lah memperlebar disparitas har BBG terhadap premium dan ter dijaga. Jadi, jangan hanya untu kepentingan jangka pendek.